



ANALISIS MANAJEMEN KREDIT LUMBUNG PITIH NAGARI (LPN) MANDIRI TELAGA BIRU DI KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA

Credit Management Analysis at Lumbung Pitih Nagari (LPN) Mandiri Telaga Biru, Koto Besar District, Dharmasraya Regency

Mezi Cantika^{1*}, Rudi Febriamansyah², Zednita Azriani³

^{1*}Mahasiswa Progam Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas

^{2,3}Dosen Progam Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas

email koresponden: mezcantika30@gmail.com

Abstrak

LPN Mandiri Telaga Biru merupakan salah satu Lumbung Pitih Nagari (LPN) yang masih bertahan hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan dan manajemen kredit LPN Mandiri Telaga Biru sebagai dasar evaluasi keberlanjutan LPN selaku lembaga keuangan mikro. Analisis kinerja keuangan periode 2020–2023 berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM No.06/Per/M.KUKM/V/2006, yang mencakup rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Hasil penelitian menunjukkan rasio likuiditas mengalami fluktuasi, dengan penurunan rasio lancar dan cepat hingga 2022, lalu membaik di 2023. Rasio solvabilitas meningkat hingga 2022, dengan rasio hutang terhadap modal naik menjadi 197%, namun membaik pada 2023 menjadi 155%. Rasio profitabilitas cenderung menurun, di mana ROI turun dari 11% ke 8%, dan ROE menjadi 32% pada 2023. Rasio aktivitas menunjukkan perbaikan, terutama pada perputaran aktiva dan piutang. Untuk mendukung kinerja keuangannya, LPN menerapkan manajemen kredit melalui perencanaan, analisis kelayakan nasabah dengan prinsip 5C, penetapan suku bunga, pengawasan, serta penagihan kredit. Pencapaian penting terlihat dari penurunan rasio Non Performing Loan (NPL) dari 9% pada 2020 menjadi 5% pada 2023, yang menunjukkan peningkatan manajemen risiko kredit melalui prinsip kehati-hatian dan pengawasan pasca pencairan. Secara keseluruhan, LPN Mandiri Telaga Biru menunjukkan upaya positif dalam memperkuat keberlanjutannya sebagai lembaga keuangan mikro.

Kata kunci: Lumbung Pitih Nagari (LPN), Kinerja Keuangan, Manajemen Kredit, Pembiayaan Mikro

Abstract

LPN Mandiri Telaga Biru is one of Lumbung Pitih Nagari (LPNs) that still operates this day. This study aims to analyze the financial performance and credit management of LPN Mandiri Telaga Biru in order to evaluate its sustainability as a microfinance institution. The LPN financial performance from 2020 to 2023 based on the Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs No.06/Per/M.KUKM/V/2006, including liquidity, solvency, profitability, and activity ratio. The results show that liquidity ratio fluctuated where quick ratio declined until 2022 and then increased in 2023. Solvency ratio increased until 2022, with the debt to equity ratio rised to 197%, then improved to 155% in 2023. Profitability ratio showed a downward trend, with ROI decreased from 11% to 8% and ROE reached 32% in 2023. Activity ratio showed improvement, particularly in asset and receivables turnover. In order to support its financial performance, LPN implemented credit management through credit planning, feasibility analysis using the 5C principles, interest rate determination, supervision, and loan collection. A significant achievement was the reduction of the Non Performing Loan (NPL) ratio from 9% in 2020 to 5% in 2023. This indicates that an improvement in credit risk management through circumspection principles and reimbursement monitoring. Overall, LPN Mandiri Telaga Biru demonstrates positive efforts in strengthening its sustainability as a microfinance institution.

Keywords: Lumbung Pitih Nagari (LPN), Financial Performance, Credit Management, Microfinance

PENDAHULUAN

Mayoritas petani di Indonesia memiliki pendapatan yang sangat rendah, sehingga kehidupan petani-petani tersebut jauh dari kata sejahtera. Hal ini dapat disebabkan oleh susahnyanya para petani dalam memperoleh permodalan untuk meningkatkan produksi mereka, sehingga berdampak pada pendapatan yang diperoleh (Anzhori, 2018). Permodalan di bidang agribisnis memegang peranan yang sangat vital dalam menggerakkan roda pembangunan dan mendorong pertumbuhan perekonomian melalui berbagai kegiatan produktif di sektor pertanian. Petani sebagai pelaku utama agribisnis memerlukan dukungan permodalan yang memadai untuk membiayai kegiatan usahatani mereka, mulai dari pengadaan input produksi, pemeliharaan, hingga proses pascapanen. Pengelolaan modal usahatani tidak hanya mencakup aspek penyediaan dan penggunaan dana, tetapi juga membutuhkan sistem pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan modal agar dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran dalam mengembangkan usaha pertanian yang berkelanjutan (Mariati, 2022).

Kondisi penguasaan lahan pertanian yang cenderung sempit, sehingga membatasi potensi produksi dan pendapatan yang bisa dihasilkan oleh petani dalam kegiatan usahatannya. Rendahnya produktivitas dan skala usaha yang kecil kemudian menciptakan lingkaran permasalahan yang kompleks, dimana hal tersebut justru menjadi hambatan bagi petani untuk dapat mengakses pinjaman modal dari lembaga keuangan formal, karena dianggap tidak memenuhi persyaratan dan berisiko tinggi dalam pengembalian pinjaman (Mariati, 2022). Keuangan mikro telah menjadi instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Konsep keuangan mikro melibatkan penyediaan layanan keuangan dalam skala kecil kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang umumnya

tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal (Wulandari, 2016). Dalam konteks global, microfinance atau pembiayaan mikro didefinisikan sebagai layanan keuangan yang diperuntukkan bagi pelaku usaha skala kecil yang umumnya mengalami kesulitan mengakses layanan perbankan konvensional karena tingginya biaya operasional yang ditetapkan oleh lembaga bank (Baskara, 2013).

Lumbung Pitih Nagari (LPN) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro yang berkembang di Sumatera Barat sebagai manifestasi dari kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Keberadaan LPN dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum operasionalnya. Salah satu landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). UU ini memberikan payung hukum bagi berbagai bentuk LKM, termasuk LPN, untuk beroperasi dan memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. LPN pada mulanya didirikan di setiap Nagari (pemerintahan terendah di Sumbar) dan selanjutnya mengalami perubahan. Data 2001 menyebutkan di setiap Nagari terdapat LPN, atau sekitar 543 LPN. Saat ini, sekitar 500-an LPN telah bubar dan sisanya ada yang berubah status hukum menjadi BPR, lainnya beroperasi dengan sistem koperasi, dan hanya satu dua yang masih berstatus LPN. Melihat kondisi ini, maka status LPN dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu, LPN dalam bentuknya yang asli, LPN yang dibina oleh Bank Nagari (milik Pemda Sumbar), LPN yang sudah beralih menjadi BPR dengan nama BPR-LPN dan berbadan hukum, serta semuanya menerapkan sistem konvensional. Perubahan status LPN ini dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaan (institusional environment) seperti UU, dan tingkat kepercayaan (trust) masyarakat. Ketentuan dari Bank Nagari bahwa LPN atau koperasi yang sudah memiliki aset minimal Rp 1 miliar dapat berubah statusnya menjadi BPR. Sementara pada tingkat kepercayaan, LPN kalah bersaing dengan Bank, BPR atau koperasi yang

dianggap lebih profesional. Bahkan, keberadaan rentenir atau bank keliling (Induk Julo) masih diminati oleh sebagian kecil masyarakat karena prosesnya yang mudah (atau dibuat semudah mungkin) (Sila, 2010).

Keberadaan Lumbung Pitih Nagari telah ada jauh sebelum masuknya lembaga keuangan mikro formal seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BRI Unit Desa dan lembaga keuangan mikro lainnya ke pelosok-pelosok Sumatera Barat. LPN dibangun berdasarkan nilai-nilai luhur gotong royong, kekeluargaan dan saling membantu yang sudah ada sejak lama di Mingakabau (Suartini, 2021). Berikut merupakan tabel 1 perbedaan antara Bank Umum, BPR, dan Lumbung Pitih Nagari (LPN) :

sebagai lokasi penelitian didasarkan pada keunikannya sebagai salah satu LPN yang masih konsisten mempertahankan nilai-nilai dan bentuk asli operasionalnya sejak awal pendiriannya, dimana LPN ini tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dalam pengelolaannya seperti musyawarah mufakat dan gotong royong, sementara tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan esensi dasarnya sebagai lembaga keuangan berbasis adat nagari. Hal ini terlihat dari sistem operasionalnya yang tetap mengutamakan kesejahteraan anggota melalui penetapan margin bagi hasil yang adil dan transparan berdasarkan musyawarah. Keberhasilan LPN Mandiri Telaga Biru dalam mempertahankan orisinalitasnya sambil tetap tumbuh dan berkembang menjadikannya model yang ideal untuk memahami

Tabel 1. Perbedaan Antara Bank Umum, BPR dan Lumbung Pitih Nagari (LPN)

Perbedaan	Bank Umum	BPR	LPN
Tujuan	Komersil (berfokus keuntungan pemegang saham atau milik pribadi)	Komersil (berfokus keuntungan pemegang saham atau milik pribadi)	Mensejahterakan masyarakat nagari atau anggotanya
Kepemilikan	Pemegang saham, milik pribadi	Pemegang saham, milik pribadi	Milik masyarakat adat nagari
Modal	Dana pemerintah, dana dari simpanan nasabah, dana pemegang saham.	Dana pemerintah, dana dari simpanan nasabah, dana pemegang saham.	Dana dari masyarakat nagari atau anggota
Suku bunga	Rendah	Tinggi	Tinggi
Jangka waktu pinjaman	Per bulan dan per tahun	Per bulan dan per tahun	Per minggu, per bulan dan per tahun
Skala kredit	Makro	Makro dan mikro	Mikro
Agunan	Pakai agunan	Pakai agunan	Pakai agunan dan ada yang tidak pakai agunan
Persyaratan	Banyak persyaratan di banding BPR	Lebih mudah dibandingkan bank umum	Lebih mudah di bandingkan bank umum dan lebih fleksibel

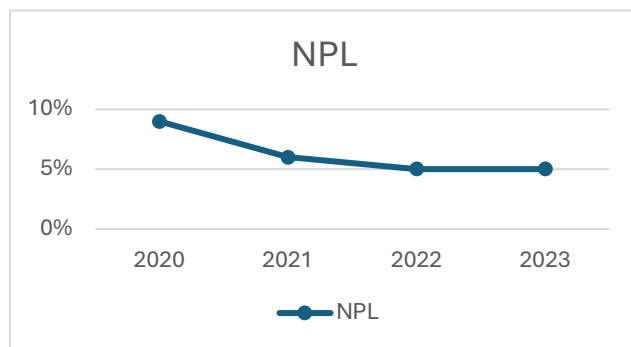
Sumber : Andrianto, 2020; Junaedi, 2021; dan Sila, 2010

LPN Mandiri Telaga Biru, yang didirikan pada bulan Oktober 2009, menjadi contoh nyata bagaimana lembaga keuangan mikro dapat berperan penting dalam mendukung perekonomian lokal. Berawal dari diskusi informal mengenai maraknya praktik pinjaman dengan bunga tinggi dan keinginan untuk membantu petani serta pedagang kecil. Pemilihan Lumbung Pitih Nagari (LPN) Mandiri Telaga Biru

bagaimana lembaga keuangan mikro berbasis adat dapat bertahan dan berkembang di era modern tanpa kehilangan jati dirinya.

Non Performing Loan (NPL) adalah rasio kredit bermasalah yang menunjukkan persentase kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan. Kredit bermasalah ini mencakup kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan

macet sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh regulator. Semakin tinggi rasio NPL mengindikasikan semakin buruk kualitas kredit yang dimiliki oleh lembaga keuangan tersebut. Dengan tingginya biaya modal akan berpengaruh terhadap perolehan laba bersih dari LPN Mandiri Telaga Biru. Non Performing Loan (NPL) LPN Mandiri Telaga Biru menunjukkan persentase yang berfluktuasi sejak berdirinya. Namun, seiring berjalannya waktu LPN Mandiri Telaga Biru mampu membuktikan NPL yang semakin membaik pada tahun 2019 yaitu 9% kemudian menurun menjadi 5% pada tahun 2023.



Gambar 1. Non Performing Loan (NPL) LPN Mandiri Telaga Biru Tahun 2020-2023

Merujuk pada ketentuan dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) nomor 13/1/PBI/2011 pasal 2, setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan evaluasi tingkat kesehatannya menggunakan metode Risk Based Bank Rating, baik untuk penilaian individual maupun konsolidasi. Kesehatan bank dapat diukur dengan beberapa indikator, salah satunya yaitu melalui laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan ini, perhitungan rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Seperti rasio-rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, rasio rentabilitas, dan rasio solvabilitas. Namun, sejak didirikan pada tahun 2009, LPN belum pernah menjalankan proses evaluasi terhadap kinerja keuangannya

Sebagai lembaga keuangan mikro yang telah menunjukkan ketahanan dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan bisnis, evaluasi berkelanjutan terhadap praktik manajemen kredit dan kinerja keuangan menjadi kunci untuk memastikan LPN Mandiri Telaga Biru dapat terus berkembang dan memberikan layanan optimal kepada masyarakat di wilayah operasionalnya. Keberhasilan dalam manajemen kredit ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan operasional, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap LPN Mandiri Telaga Biru sebagai mitra keuangan.

Berdasarkan pemersalahan diatas, maka pertanyaan yang akan dijawab pada penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan pada Lumbung Pitih Nagari (LPN) Mandiri Telaga Biru pada tahun 2020-2023? dan bagaimana manajemen kredit Lumbung Pitih Nagari (LPN) Mandiri Telaga Biru pada tahun 2023?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di LPN Mandiri Telaga Biru yang berada di wilayah Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder yang digunakan berasal dari arsip data internal dan dokumen laporan keuangan LPN Mandiri Telaga Biru dalam rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2020-2023.

Tujuan pertama penelitian menerapkan analisis deskriptif kuantitatif. Dalam pendekatan ini, analisis dilakukan melalui perhitungan berbagai rasio dari variabel yang telah ditetapkan, diikuti dengan interpretasi komprehensif atas hasil perhitungan tersebut. Evaluasi kinerja keuangan difokuskan pada data selama periode empat tahun terakhir, yaitu rentang waktu 2020 hingga 2023. Evaluasi dilakukan menggunakan empat kategori rasio : Likuiditas,

Solvabilitas, Profitabilitas, dan Aktivitas. Kasmir (2015), bentuk-bentuk hasil keuangan adalah sebagai berikut :

1. Rasio Likuiditas

a. *Current Ratio* (Rasio lancar)

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

b. *Quick Ratio* (Rasio cepat)

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

2. Rasio Solvabilitas

a. *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Hutang Atas Modal)

$$\text{Total Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100$$

b. *Total Debt to Total Capital Ratio* (Rasio hutang aktiva)

$$\text{Total Debt to Total Capital Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

3. Rasio Profitabilitas

a. *Return on Investment* (ROI)

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

b. *Return of Equity* (ROE)

$$\text{REO} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

4. Rasio Aktivitas

a. *Total Asset Turn Over* (Rasio Perputaran Harta)

$$\text{Total Asset Turn Over} = \frac{\text{Pinjaman}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

b. *Receivable Turn Over* (Rasio Perputaran Piutang)

$$\text{Receivable Turn Over} = \frac{\text{Pinjaman}}{\text{Piutang}} \times 100\%$$

Penilaian mengacu pada standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM RI No.06/Per/M.KUKM/V/2006 yang dikeluarkan pada 1 Mei 2006, yang berisi Pedoman Penilaian Koperasi pada tabel 2.

Tujuan kedua dari penelitian ini adalah menganalisis manajemen kredit pada LPN Mandiri Telaga Biru dengan menggunakan pendekatan fungsi manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) terhadap Jenis Kredit Yang Ditawarkan, Agunan/Jaminan Kredit, Jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit, Prinsip Pemberian Kredit, Prosedur Pemberian Kredit, dan Strategi Mengatasi Kredit Bermasalah. Analisis dilakukan untuk menggambarkan pengelolaan manajemen kredit LPN Mandiri Telaga Biru pada tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kecamatan Koto Besar merupakan satu dari 11 Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Luas Kecamatan Koto Besar seluas $\pm 560,58 \text{ km}^2$. Kecamatan Koto Besar terletak pada $101^{\circ}23'57'' - 101^{\circ}42'20''$ Bujur Timur dan $1^{\circ}05'03'' - 1^{\circ}21'30''$ Lintang Selatan. Kecamatan Koto Besar dengan ketinggian ± 113 (mdpl) diatas permukaan laut. Kecamatan Koto Besar memiliki 7 kenagarian yang terdiri dari Nagari Koto Gadang, Nagari Koto Tinggi, Nagari Bonjol, Nagari Abai Siat, Nagari Koto Besar, Nagari Koto Laweh, dan Nagari Koto Ranah.

Profil Umum Lumbung Pitih Nagari (LPN) Mandiri Telaga Biru

Pada tahun 2009, masyarakat Nagari Koto Ranah dihadapi dengan banyaknya lembaga keuangan dari luar yang menerapkan sistem pembayaran harian dan mingguan dengan suku bunga yang sangat tinggi.

Tabel 2. Pedoman Penilaian Koperasi

No.	Jumlah Rasio	Standar	Kriteria	Skor
1.	Rasio Likuiditas			
	• <i>Current Rasio</i> (rasio lancar)	200% -250%	Sehat	100
		175% -<200%	Cukup Sehat	75
		150% - <175%	kurang Sehat	50
		125% -<150%	Tidak Sehat	25
		<125%	Sangat Tidak Sehat	0
	• <i>Quick ratio</i> (rasio cepat)	200% -250%	Sehat	100
		175% -<200%	Cukup Sehat	75
		150% - <175%	kurang Sehat	50
		125% -<150%	Tidak Sehat	25
		<125%	Sangat Tidak Sehat	0
2.	Rasio Solvabilitas			
	• <i>Total Debt to Equity Ratio</i> (Rasio Hutang Atas Modal)	≤70%	Sehat	100
		>70%-100%	Cukup Sehat	75
		100%-150%	kurang Sehat	50
		150%-200%	Tidak Sehat	25
		>200%	Sangat Tidak Sehat	0
	• <i>Total Debt to Total Capital Rasio</i> (Rasio hutang aktiva)	≤40%	Sehat	100
		>40%-50%	Cukup Sehat	75
		50%-60%	kurang Sehat	50
		60%-80%	Tidak Sehat	25
		>80%	Sangat Tidak Sehat	0
3.	Rasio Profitabilitas			
	• <i>Return on investment</i> (ROI)	≥10%	Sehat	100
		7%-<10%	Cukup Sehat	75
		3%-<7%	kurang Sehat	50
		1%-<3%	Tidak Sehat	25
		<1%	Sangat Tidak Sehat	0
	• <i>Return of Equity</i> (REO)	≥21%	Sehat	100
		15%-20%	Cukup Sehat	75
		10%-14%	kurang Sehat	50
		3%-9%	Tidak Sehat	25
		<3%	Sangat Tidak Sehat	0
4.	Rasio Aktivitas			
	• <i>Total Asset Turn Over</i> (Rasio Perputaran Harta)	≥3,5 kali	Sehat	100
		2,5 kali-<3,5 kali	Cukup Sehat	75
		1,5 kali-<2,5 kali	kurang Sehat	50
		1 kali-<1,5 kali	Tidak Sehat	25
		1 kali	Sangat Tidak Sehat	0
	• <i>Receivable Turn Over</i> (Rasio Perputaran Piutang)	≥12 kali	Sehat	100
		10kali-<12 kali	Cukup Sehat	75
		8 kali-<10kali	kurang Sehat	50
		6 kali-<8 kali	Tidak Sehat	25
		6 kali	Sangat Tidak Sehat	0

Kondisi ini sangat memberatkan masyarakat, terutama para pedagang kecil dan petani yang membutuhkan modal untuk mengembangkan

usahanya. Berawal dari situasi tersebut, pada bulan Oktober 2009, delapan orang tokoh pendiri LPN yang diprakarsai oleh Bapak Kurmen, A.Ma (alm) - yang

saat itu menjabat sebagai kepala MIN Telaga Biru Nagari Koto Ranah - berinisiatif untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan. Setiap pendiri menyertakan modal awal sebesar Rp. 1.000.000. Pada awalnya, lembaga ini berbentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP), namun bentuk koperasi hanya beberapa bulan sebelum terbit izin Lumbung Pitih Nagari (LPN) yaitu pada rentang waktu bulan September hingga bulan November tahun 2009. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan kesepakatan bersama, bentuk kelembagaan diubah menjadi sistem perbankan dengan nama Lumbung Pitih Nagari (LPN) yang sudah memiliki izin akte notaris pada tanggal 8 Desember 2009.

Pemilihan bentuk LPN didasari pertimbangan bahwa LPN memiliki jangkauan layanan yang lebih luas dibandingkan koperasi yang terbatas hanya untuk anggotanya. Nama "Mandiri Telaga Biru" dipilih untuk mengenang sejarah daerah tersebut yang awalnya merupakan desa transmigrasi bernama Telaga Biru. Para pendiri berkomitmen untuk melestarikan nilai sejarah daerah melalui pemilihan nama tersebut.

Gambaran Pertumbuhan Keuangan LPN Mandiri Telaga Biru

Pertumbuhan keuangan Lumbung Pitih Nagari menunjukkan perkembangan yang signifikan sebagai lembaga keuangan mikro tradisional masyarakat di Sumatera Barat. Berdasarkan tinjauan sejarahnya, LPN telah bertransformasi dari sistem simpan pinjam sederhana menjadi lembaga keuangan yang lebih terstruktur dengan peningkatan jumlah transaksi dan diversifikasi layanan. LPN Mandiri Telaga Biru juga mengalami peningkatan aset setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 LPN memiliki aset Rp2.437.998.943 kemudian pada tahun 2023 asetnya menjadi Rp5.663.354.018.

Untuk mendukung keberlangsungan operasional LPN juga mendata jumlah nasabah sebagai konsumen produk kreditnya, khususnya nasabah kredit LPN

pada tahun 2020 sebanyak 202 orang kemudian pada tahun 2023 bertambah menjadi 241 orang. Ditinjau dari sisi kelembagaan, LPN Mandiri Telaga Biru menunjukkan ketahanan yang luar biasa di tengah persaingan dengan lembaga keuangan modern, dimana LPN Mandiri Telaga Biru mampu mempertahankan eksistensinya sambil mengadopsi praktik manajemen keuangan yang lebih baik. LPN Mandiri Telaga Biru berkontribusi pada pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap lembaga keuangan eksternal. Berikut data neraca keuangan LPN Mandiri Telaga Biru 2020-2023 :

LPN Mandiri Telaga Biru menunjukkan perkembangan signifikan sebagai lembaga keuangan mikro berbasis adat Minangkabau di Sumatera Barat. Sejak berdiri, lembaga ini berhasil bertransformasi dari sistem simpan pinjam sederhana menjadi institusi keuangan yang terstruktur dengan layanan yang beragam. Pertumbuhan aset dari tahun 2020 hingga 2023 mencerminkan peningkatan kepercayaan masyarakat dan efektivitas pengelolaan dana. Aset total meningkat dari Rp2,43 miliar (2020) menjadi Rp5,66 miliar (2023), dengan peningkatan signifikan pada pos kredit yang diberikan dan antar bank aktiva.

Jumlah nasabah tabungan, deposito, dan kredit juga mengalami kenaikan, mencerminkan keberhasilan ekspansi layanan dan daya tarik lembaga bagi masyarakat. Dari sisi kelembagaan, LPN mampu mempertahankan nilai-nilai lokal sekaligus mengadopsi praktik manajemen modern. Dalam hal permodalan, peningkatan modal dan cadangan umum menunjukkan ketahanan finansial yang membaik. Cadangan umum, misalnya, meningkat sebesar 26% pada 2022 dan 23% pada 2023, sementara SHU (Sisa Hasil Usaha) tumbuh 22% pada 2023 dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan stabilitas internal lembaga, tetapi juga kontribusinya terhadap penguatan ekonomi lokal, terutama dalam mengurangi ketergantungan masyarakat pada lembaga keuangan eksternal.

Tabel 3. Data Neraca Keuangan LPN Mandiri Telaga Biru

Laporan Neraca LPN Mandiri Telaga Biru Tahun 2020-2023 (Rp)				
Pos-Pos	2020	2021	2022	2023
Aktiva Lancar				
Kas	80,894,998	63,662,009	204,543,499	220,838,700
Antar Bank Aktiva	125,825,095	427,929,428	284,840,918	398,811,218
Kredit Yang Diberikan	1,981,084,050	2,615,092,500	4,118,845,000	4,808,817,000
Total Aktiva Lancar	2,187,804,143	3,106,683,937	4,608,229,417	5,428,466,918
Aktiva Tetap				
Inventaris (Persediaan)	12,574,800	17,463,200	94,162,200	124,640,100
Total Aktiva Tetap	12,574,800	17,463,200	94,162,200	124,640,100
Rupa-Rupa Aktiva	237,620,000	34,500,000	272,083,850	110,247,000
Total Aktiva	2,437,998,943	3,158,647,137	4,974,475,467	5,663,354,018
Pasiva				
Hutang Lancar				
Kewajiban Segera	3,887,582	10,318,185	10,677,152	62,213,978
Tabungan	660,451,579	1,144,720,805	1,371,326,251	1,592,277,156
Antar Kantor Passiva	21,611,951	-	1,006,147,000	762,063,000
Total Hutang Lancar	685,951,112	1,155,038,990	2,388,150,403	2,416,554,134
Kewajiban Jangka Panjang	332,000,000	323,000,000	546,000,000	653,000,000
Kewajiban Lainnya				
Rupa-Rupa Pasiva	118,249,457	158,819,884	237,507,069	312,564,374
Jumlah Kewajiban Lainnya	450,249,457	481,819,884	783,507,069	965,564,374
Modal				
Dana Setoran Modal	905,200,000	1,044,900,000	1,210,700,000	1,557,600,000
Cadangan				
Cadangan Modal	115,695,446	145,624,089	178,642,283	219,881,630
Cadangan Pembangunan	1,082,240	1,082,240	1,082,240	386,240
SHU				
SHU Tahun Berjalan (Laba Bersih)	279,820,688	330,181,934	412,393,472	503,367,640
Total Pasiva	2,437,998,943	3,158,647,137	4,974,475,467	5,663,354,018

Analisis Kinerja Keuangan LPN Mandiri Telaga Biru

Analisis laporan keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat pada suatu keadaan

Tabel 4. Ratio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas

No	Tahun	Rasio	Kriteria	Skor
1	Rasio Likuiditas			
	a. Rasio Lancar			
	2020	319%	Tidak Sehat	25
	2021	269%	Tidak Sehat	25
	2022	193%	Cukup Sehat	75
	2023	225%	Sehat	100
	Jumlah			375
	Rata-Rata	251%	Kurang Sehat	56.25
	b. Rasio Cepat			
	2020	317%	Tidak Sehat	25
	2021	267%	Tidak Sehat	25
	2022	189%	Cukup Sehat	75
	2023	219%	Sehat	100
	Jumlah			375
	Rata-Rata	248%	Kurang Sehat	56.25
2	Rasio Solvabilitas			
	a. Rasio Hutang Atas Modal			
	2020	76%	Cukup Sehat	75
	2021	111%	Kurang Sehat	50
	2022	197%	Tidak Sehat	25
	2023	155%	Tidak Sehat	25
	Jumlah			175
	Rata-Rata	135%	Kurang Sehat	43.75
	b. Rasio Hutang Atas Aktiva			
	2020	28%	Sehat	100
	2021	37%	Sehat	100
	2022	48%	Cukup Sehat	75
	2023	43%	Cukup Sehat	75
	Jumlah			350
	Rata-Rata	39%	Sehat	87.5

keuangan perusahaan, bagaimana pencapaian keberhasilan perusahaan masa lalu, saat ini, dan prediksi di masa mendatang, analisis laporan keuangan tersebut akan digunakan dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Sujarweni, 2020).

Analisis kinerja keuangan LPN Mandiri Telaga Biru pada periode 2020–2023 dilakukan menggunakan empat rasio utama : likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Penilaian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi finansial

lembaga dan efektivitas pengelolaan dana yang dilakukan. Ratio dapat dilihat pada tabel 5 dan 6.

Rasio likuiditas, yang mencerminkan kemampuan LPN dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, menunjukkan rata-rata rasio lancar sebesar 251% dan

Tabel 5. Ratio Provitalitas dan Rasio Aktivitas

No	Tahun	Rasio	Kriteria	Skor
1 Rasio Provitalitas				
a. ROI				
	2020	11%	Sehat	100
	2021	10%	Sehat	100
	2022	8%	Cukup Sehat	75
	2023	9%	Cukup Sehat	75
	Jumlah			350
	Rata-Rata	10%	Sehat	87.5
b. ROE				
	2020	31%	Sehat	100
	2021	32%	Sehat	100
	2022	34%	Sehat	100
	2023	32%	Sehat	100
	Jumlah			100
	Rata-Rata	32%	Sehat	100
2 Rasio Aktivitas				
a. Rasio Perputaran Aktiva				
	2020	0.81	Sangat Tidak Sehat	0
	2021	0.83	Sangat Tidak Sehat	0
	2022	0.83	Sangat Tidak Sehat	0
	2023	0.85	Sangat Tidak Sehat	0
	Jumlah			0
	Rata-Rata	0.83	Sangat Tidak Sehat	0
b. Rasio Perputaran Piutang				
	2020	10.64	Cukup Sehat	75
	2021	16.30	Sehat	100
	2022	20.57	Sehat	100
	2023	20.95	Sehat	100
	Jumlah			375
	Rata-Rata	17.11	Sehat	93.75

Rasio Likuiditas

rasio cepat 248%. Walaupun besar, nilai ini dikategorikan "Kurang Sehat" berdasarkan standar Kementerian Koperasi, karena berada di luar rentang

ideal. Namun, terjadi perbaikan signifikan pada tahun 2023 di mana rasio mencapai kategori "Sehat".

Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas, yang mengukur kemampuan lembaga menanggung beban hutang jangka panjang, memperlihatkan bahwa rasio hutang terhadap modal mengalami tren memburuk, rata-rata 135% (kategori "Kurang Sehat"). Namun, rasio hutang terhadap aset tetap terjaga dengan rata-rata 39%, berada dalam kategori "Sehat", yang menandakan struktur pendanaan masih terkendali.

Rasio Profitabilitas

Dari sisi profitabilitas, LPN mencatat kinerja baik dengan rata-rata Return on Investment (ROI) sebesar 10% dan Return on Equity (ROE) sebesar 32%, keduanya dalam kategori "Sehat". Hal ini menunjukkan efisiensi tinggi dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang ditanamkan.

Rasio Aktivitas

Untuk rasio aktivitas, terdapat perbedaan mencolok: perputaran aktiva sangat rendah (rata-rata 0,83 kali) dan dikategorikan "Sangat Tidak Sehat", namun perputaran piutang menunjukkan kinerja sangat baik (rata-rata 17,11 kali), mencerminkan efektivitas tinggi dalam pengelolaan piutang.

Secara keseluruhan, LPN Mandiri Telaga Biru memperlihatkan kekuatan pada aspek profitabilitas dan pengelolaan piutang. Namun, tantangan masih terlihat pada efisiensi penggunaan aset dan tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal. Strategi perbaikan disarankan terutama dalam pengelolaan aset dan optimalisasi struktur permodalan

Manajemen Kredit LPN Mandiri Telaga Biru

Manajemen mencakup serangkaian fungsi yang terstruktur, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), serta pengendalian (controlling) (Siswanto, 2021). LPN Mandiri Telaga Biru

menerapkan sistem manajemen kredit berbasis prinsip POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) untuk memastikan proses pemberian kredit yang bertanggung jawab dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Perencanaan (Planning)

LPN Mandiri Telaga Biru memulai manajemen kredit dengan menyusun visi, misi, dan tujuan LPN. Dalam perencanaan kredit, LPN menetapkan jenis-jenis kredit yang ditawarkan, sistem agunan atau jaminan yang berlaku, jenis suku bunga, prinsip-prinsip pemberian kredit, hingga strategi untuk menangani kredit bermasalah. Meskipun berstatus sebagai lembaga keuangan mikro, LPN tetap mengacu pada prinsip-prinsip umum manajemen kredit yang ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Hal ini menunjukkan komitmen LPN terhadap kelancaran operasional dan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat.

LPN menetapkan jenis-jenis kredit berdasarkan kebutuhan masyarakat, terutama pelaku UMKM di sektor pertanian dan perdagangan. Kredit diklasifikasikan menurut tujuan penggunaannya, antara lain kredit modal kerja dan kredit produktif. Penetapan suku bunga dilakukan dengan sistem flat rate, memberikan kemudahan bagi nasabah dalam perhitungan angsuran. Agunan yang diterima mencakup kendaraan bermotor, sertifikat tanah, dan BPKB, serta kepemilikan saham di LPN.

Pengorganisasian (Organizing)

Struktur organisasi dibentuk secara musyawarah oleh badan pengawas dan pengurus, dengan RAT (Rapat Anggota Tahunan) sebagai otoritas tertinggi. Tugas dan wewenang didefinisikan secara jelas untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih fungsi. Struktur organisasi di LPN Mandiri Telaga Biru dirancang secara hierarkis dan jelas. Tugas dan wewenang dibagi secara terstruktur antara manajer, kepala kantor, bagian tabungan dan kredit, hingga staf

lapangan. Pemilihan dan penggantian pengurus dilakukan secara musyawarah dalam rapat anggota bersama badan pengawas. Dengan pengorganisasian ini, pelaksanaan manajemen kredit dapat berjalan efektif dan menghindari tumpang tindih dalam tugas operasional.

Pelaksanaan (Actuating)

Pelaksanaan kredit dimulai dengan promosi oleh Account Officer (AO), dilanjutkan dengan proses verifikasi dan analisis kredit menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition). Proses pencairan bisa dilakukan dalam satu hari jika dokumen lengkap, dan dana dapat dicairkan secara tunai atau transfer. Dalam pelaksanaan manajemen kredit, proses dimulai dari pengajuan permohonan pinjaman oleh nasabah, analisis kelayakan berdasarkan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, condition), hingga pencairan dana kredit. Namun, LPN belum menerapkan pendekatan 7P secara menyeluruh. Pelaksanaan ini dilakukan dengan fleksibilitas, terutama bagi nasabah lama yang dianggap loyal, yang kadang mengakibatkan pelanggaran terhadap penilaian kelayakan. Hal ini menjadi salah satu penyebab fluktuasi rasio Non Performing Loan (NPL) meskipun secara umum masih dalam tren membaik.

Pengawasan (Controlling)

Pengawasan dilakukan secara berkala oleh pengurus dan badan pengawas, terutama untuk menilai kinerja kredit dan menekan angka kredit bermasalah. Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), yang berfungsi sebagai RUPS, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kredit dilakukan. Data dan laporan keuangan juga dijadikan dasar untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kredit. Dalam hal penanganan kredit bermasalah, LPN memiliki mekanisme penagihan dan penyitaan agunan berupa kendaraan bermotor atau surat berharga seperti BPKB dan sertifikat tanah. Secara umum, manajemen kredit di LPN Mandiri Telaga Biru berjalan cukup baik, namun

masih perlu ditingkatkan. Disarankan agar LPN tetap konsisten menerapkan prinsip 5C tanpa kompromi meskipun terhadap nasabah lama. Selain itu, diversifikasi produk kredit dan peningkatan kualitas aset produktif sangat penting untuk memperbaiki rasio aktivitas dan menjaga stabilitas keuangan LPN Mandiri Telaga Biru.

Secara keseluruhan, manajemen kredit LPN Mandiri Telaga Biru menunjukkan struktur yang solid dan responsif terhadap kondisi masyarakat sekitar. Namun, perbaikan pada aspek evaluasi kelayakan dan pengendalian risiko tetap diperlukan guna menjaga kualitas portofolio kredit di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan LPN Mandiri Telaga Biru selama periode 2020–2023, secara keseluruhan kondisi keuangan lembaga ini dapat dikategorikan cukup sehat namun belum sepenuhnya optimal. Rasio likuiditas dan profitabilitas menunjukkan kinerja yang baik dan stabil, mencerminkan kemampuan LPN dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan menghasilkan keuntungan. Namun, rasio solvabilitas berada pada kategori kurang sehat, menandakan tingginya ketergantungan pada sumber pendanaan luar. Selain itu, rasio aktivitas menunjukkan efisiensi penggunaan aset yang masih rendah, khususnya pada rasio perputaran harta. Perkembangan kinerja keuangan ini berkorelasi erat dengan perbaikan rasio NPL yang menurun dari 9% menjadi 5% selama periode tersebut. Penurunan NPL ini menjadi indikator penting bahwa meskipun kinerja keuangan belum sepenuhnya optimal, sistem pengelolaan kredit yang baik mampu memperkuat ketahanan dan keberlanjutan keuangan LPN secara keseluruhan.

Manajemen kredit LPN Mandiri Telaga Biru secara umum telah berjalan dengan baik karena secara struktural LPN telah menjalankan sebagian besar prosesnya sesuai teori. Secara teoritis, manajemen

kredit yang ideal harus menerapkan prinsip 5C dan prosedur kredit yang sistematis, mulai dari penilaian kelayakan, wawancara, hingga monitoring kredit. Keberhasilan pengelolaan ini tercermin dari penurunan rasio NPL secara signifikan dari 9% pada tahun 2020 menjadi 5% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa LPN telah mampu mengurangi tingkat kredit bermasalah. Manajemen kredit yang baik tidak hanya menurunkan risiko keuangan, tetapi juga menjadi dasar penting bagi keberlanjutan LPN.

SARAN

1. Untuk meningkatkan rasio likuiditas yang masih berada pada kriteria kurang sehat menunjukkan kelebihan kas yang menganggur, sehingga LPN perlu mengalokasikan sebagian dana ke produk kredit produktif agar menghasilkan pendapatan, dan mengelola arus kas masuk dan keluar secara ketat untuk menjaga stabilitas keuangan harian.
2. Rendahnya modal sendiri dibandingkan total hutang dalam rasio solvabilitas menunjukkan bahwa struktur pendanaan LPN masih terlalu bergantung pada dana pinjaman, yang dapat meningkatkan risiko keuangan jangka panjang. Untuk mengatasi hal ini, LPN perlu meningkatkan modal internal melalui penambahan simpanan dari anggota, akumulasi laba ditahan dari keuntungan usaha, serta penguatan cadangan modal. Selain itu, LPN juga harus menahan laju penambahan utang baru dan lebih selektif dalam penggunaan dana pinjaman, memastikan hanya digunakan untuk kegiatan yang benar-benar produktif.
3. Untuk meningkatkan rasio aktivitas yang masih berada pada kriteria tidak sehat, LPN Mandiri Telaga Biru sebaiknya meningkatkan pemanfaatan dana melalui penyaluran kredit yang lebih aktif dan tepat sasaran, memperluas jangkauan nasabah, khususnya pelaku UMKM produktif di wilayah kerja LPN. LPN juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap aset produktif dan non-produktif untuk mengidentifikasi peluang pengoptimalan aset. Untuk meningkatkan rasio aktivitas yang masih berada pada kriteria tidak sehat, LPN Mandiri

Telaga Biru sebaiknya meningkatkan pemanfaatan dana melalui penyaluran kredit yang lebih aktif dan tepat sasaran, memperluas jangkauan nasabah, khususnya pelaku UMKM produktif di wilayah kerja LPN. LPN juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap aset produktif dan non-produktif untuk mengidentifikasi peluang pengoptimalan aset. Perlu dilakukan perbaikan dalam struktur permodalan dan peningkatan efektivitas penggunaan aset agar keberlanjutan keuangan LPN dapat lebih terjamin.

4. Untuk memperbaiki kualitas kredit, LPN Mandiri Telaga Biru disarankan mengevaluasi kebijakan kredit dengan tetap menerapkan prinsip 5C meskipun nasabah sudah lama bergabung atau menggunakan prinsip penilaian kredit 7C jika memungkinkan. Penerapan sistem penilaian kredit yang terstruktur dan konsisten dapat membantu mengurangi risiko NPL tanpa harus membatasi peningkatan jumlah kredit yang disalurkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto. (2020). Manajemen Kredit : Teori dan Konsep Bagi Bank Umum. CV. Penerbit Qiara Media. Pasuruan, Jawa Timur
- Anzhori, Akbar. (2018). Analisis Pendapatan Petani Melalui Program Kredit Usaha Rakyat, Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Kabupaten Sumbawa Besar. Universitas Brawijaya.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya. (2024). Kabupaten Dharmasraya dalam Angka 2024. Dharmasraya : Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya
- Bank Indonesia. (2004). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Baskara, I Gde Kajeng. (2013). Lembaga Keuangan Mikro Indonesia. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18, No. 2. Bali : Universitas Udayana.
- Junaedi. (2021). Koperasi dan Lembaga Keuangan Adat (Eksis di Masa Krisis). Penerbit Insan Cendekia Mandiri (Grup Penerbitan CV. Insan Cendekia Mandiri)
- Kasmir. (2015). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mariati, Rita dan Irawan, Carissa Nadine. (2022). Analisis kebutuhan dan Sumber Permodalan

- Usahantani Padi Sawah di Desa Jembayan. Jurnal Agribisnis. Vol 5. No 1. Kalimantan Timur. Universitas Mulawarman.
- Siswanto, Ely. (2021). Manajemen Keuangan Dasar. Universitas Negeri Malang, Malang.
- Sila, Muhammad Adlin. (2010). "Lembaga Keuangan Mikro dan Pengentasan Kemiskinan: Kasus Lumbung Pitih Nagari di Padang," Masyarakat, Jurnal Sosiologi: Vol. 15: No. 1, Article 1.
- Suartini dan Rohaya, Nizla. (2021). Lembaga Perekonomian Desa dan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Desa. Indonesian Journal of Law and Policy Studies Vol 2 No. 1. Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2020). Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian. Yogyakarta: Pustaka baru Press.
- Oman, Endang. (1995). Analisis Keragaan dan Faktor Berpengaruh Terhadap Pengembalian Kredit; Kasus Lumbung Pitih Nagari Sumatera Barat. [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor.
- (OJK), O. J. (2019). Buku 2 Perbankan (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi). Jakarta.
- Wulandari, P., & Kassim, S. (2016). Issues and challenges in financing the poor: case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. International Journal of Bank Marketing, 34(2), 216-234.